

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Globalisasi mengharuskan Indonesia dituntut siap dalam bersaing dengan negara-negara lain di Asia maupun dunia. Dalam hal ini perlu perekonomian yang kuat dan stabil sehingga mampu mengantarkan Indonesia menghadapi setiap pesaing. (Soebagyo, 2015)

Pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai kemampuan ekonomi nasional dimana keadaan ekonominya mula-mula relatif statis selama jangka waktu yang cukup lama untuk dapat menaikkan dan mempertahankan laju pertumbuhan GNP-nya hingga mencapai angka 5 sampai 7 persen atau lebih per tahun. Pertumbuhan ekonomi suatu diyakini oleh sebagian besar ekonom sebagai indikator yang paling tepat dan menggambarkan poses kemajuan pembangunan suatu negara. (Arsyad, 2010)

Untuk membangun perekonomian negara atau nasional tidak bisa terlepas dari pembangunan ekonomi secara regional. Pembangunan regional merupakan pelaksanaan dari pembangunan nasional pada wilayah tertentu yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi (Soebagyo, 2015)

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya – sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antar pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan

merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 2010)

Keberhasilan suatu pembangunan ekonomi daerah dapat di ukur dengan beberapa indikator yang lazim digunakan sebagai alat ukur. Indikator yang lazim digunakan adalah produk domestik regional bruto (PDRB) yang biasa menjadi petunjuk kinerja perekonomian secara umum sebagai ukuran kemajuan suatu daerah. Indikator lain adalah tingkat pertumbuhan, pendapatan perkapita dan pergeseran atau perubahan struktur ekonomi (Sjafrizal, 2008)

Salah satu indikator untuk melihat kesejahteraan masyarakat dari aspek materi yaitu melalui tingkat pertumbuhan ekonominya (Nugraha dan Maruto, 2007). Pertumbuhan ekonomi juga merupakan salah satu target dalam proses pembangunan ekonomi. Bahkan pembangunan ekonomi suatu negara dapat dikatakan meningkat dengan hanya melihat pada pertumbuhan ekonominya. Jika pertumbuhan ekonomi meningkat pada setiap tahunnya, maka dapat dikatakan pembangunan ekonomi pun meningkat (Dhyatmika, 2013:15).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang umumnya dipergunakan untuk melihat kesuksesan keadaan perekonomian di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi mengukur hasil dan perkembangan suatu perekonomian dari satu periode ke periode selanjutnya. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari proses produksi barang dan jasa itu dapat dilihat dari Produk Domestik Bruto (PDB). Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara dalam

suatu tahun tertentu dengan menggunakan faktor-faktor produksi milik warga negaranya dan milik penduduk di negara-negara lain. (Sukirno, 2012).

Tujuan dari usaha pembangunan ekonomi tidak hanya merupakan program dari pemerintah pusat tapi juga pemerintah daerah sedangkan pengertian pembangunan ekonomi dalam lingkup daerah yaitu suatu proses pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya – sumber daya yang ada dengan menjalin pola-pola kemitraan antara pemerintah daerah dan pihak swasta guna penciptaan lapangan kerja serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut (Arsyad, 2002:80).

Pencapaian keberhasilan pembangunan daerah melalui pembangunan ekonomi harus disesuaikan dengan kondisi dan potensi masing-masing daerah serta diperlukan perencanaan pembangunan yang terkoordinasi antar sektor, perencanaan pembangunan disini bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh tentang potensi-potensi yang dimiliki oleh suatu daerah. Keterbatasan sumber daya di suatu daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya finansial maupun sumber daya lainnya merupakan masalah umum yang dihadapi oleh sebagian besar daerah untuk dapat menggerakkan seluruh perekonomian yang mampu sebagai penggerak utama untuk memacu laju pembangunan di suatu daerah.

Istilah pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sering digunakan secara bergantian, tetapi mempunyai maksud yang sama, seperti yang dikemukakan Badrudin (2012) merupakan suatu proses dimana pemerintah dan swasta mengelola sumber daya- sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola

kemitraan antara pemerintah dengan swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja yang barudan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi. Masalah pokok pertumbuhan dan pembangunan ekonomi terletak pada penekanan kebijakan-kebijakan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang didasarkan pada kekhasan wilayah masing-masing dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber daya fisik secara lokal. Orientasi ini menggunakan inisiatif yang muncul dari daerah tersebut dalam proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi untuk menciptakan kesempatan kerja dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.

Menurut Syafrizal (2008), sejak dilaksanakannya otonomi daerah sejak tanggal 1 Januari 2001 sesuai dengan Undang-Undang No. 22 tentang Pemerintah daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, pemerintahan dan pembangunan daerah di seluruh nusantara telah memasuki era baru yaitu era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Sehingga Pemerintah Daerah diberi wewenang dan sumber keuangan baru untuk mendorong proses pembangunan di daerahnya masing-masing yang selanjutnya akan mendorong proses pembangunan nasional secara keseluruhan.

Namun pada prakteknya, otonomi daerah memunculkan beberapa permasalahan yang disebabkan perencanaan pembangunan di masing-masing daerah yang berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi. Sehingga dibutuhkan suatu kerangka keterpaduan pembangunan dengan penekanan muatan yang

berorientasi pada wilayah yang lebih luas, keterpaduan antar sektor, antar wilayah dan antar pelaku pembangunan.

Oleh karena itu, kebijakan pembangunan ekonomi daerah dilakukan guna mencapai pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi dengan mengelola potensi sumber daya yang ada di masing-masing daerah (Dhyatmika, 2013:20).

Ada dua faktor utama yang perlu diperhatikan dalam mengidentifikasi potensi kegiatan ekonomi daerah. Pertama, sektor ekonomi yang unggul atau mempunyai daya saing dalam beberapa periode tahun terakhir dan kemungkinan prospek sektor ekonomi dimasa datang. Kedua, sektor ekonomi yang potensial untuk dikembangkan di masa mendatang, walaupun pada saat ini belum mempunyai tingkat daya saing yang baik. Pembangunan ekonomi akan optimal bila didasarkan pada keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*). (Widodo, 2007:111)

Perencanaan sektoral dimaksudkan untuk pengembangan sektor-sektor tertentu disesuaikan dengan keadaan dan potensi masing-masing sektor dan juga tujuan pembangunan yang ingin dicapai, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor-sektor ekonomi selalu dihadapkan kepada kendala pembiayaan yang terbatas, sehingga perlu ditetapkan sektor-sektor mana yang harus dijadikan prioritas. Sektor yang dijadikan prioritas adalah sektor yang apabila dikembangkan dapat memberikan dampak yang besar terhadap sektor lainnya. (Kuncoro, 2002:90)

Upaya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi wilayah, perlu adanya suatu wilayah andalan yang berorientasi untuk mengembangkan potensi daerah masing-masing. Menurut Pujiati (2009) wilayah andalan merupakan suatu wilayah yang ditetapkan sebagai penggerak utama perekonomian wilayah, yang memiliki kriteria sebagai wilayah yang cepat dan tumbuh dibandingkan lokasi lainnya dalam suatu Provinsi atau Kabupaten/Kota, memiliki sektor basis dan memiliki keterkaitan ekonomi dengan daerah sekitar.

Pertumbuhan kawasan andalan diharapkan dapat memberikan imbas positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah sekitar atau daerah dibelakangnya (hinterland), melalui pembudidayaan sektor atau subsektor sebagai penggerak perekonomian daerah dan keterkaitan ekonomi antar daerah (Mursidah, 2013)

Indonesia memiliki beberapa daerah yang tingkat pendapatannya memberikan kontribusi cukup besar terhadap pendapatan nasional. Perekonomian pulau jawa mempunyai kontribusi yang sangat penting bagi perekonomian nasional. Salah satu daerah yang menopang perekonomian pulau jawa adalah Jawa Timur.

Badan Pusat Statistika Jawa Timur mencatatatkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2018 tumbuh sebesar 5,57%. Angka pertumbuhan tersebut dinilai lebih tinggi dari pertumbuhan nasional sebesar 5,27% (BPS Jawa Timur)

Propinsi Jawa Timur terbagi sendiri terbagi menjadi beberapa koridor yang meliputi Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi Jawa Timur yaitu

pertama, Koridor Utara Selatan terdiri dari Kabupaten Gresik, Sidoarjo, Pasuruan, Mojokerto, Malang, Blitar dan Kota Surabaya, Batu, Pasuruan, Mojokerto, Malang, Blitar. Kedua, Koridor Barat Daya terdiri dari Kabupaten Jombang, Kediri, Tulungagung, Trenggalek, Nganjuk, Madiun, Ponorogo, Pacitan, Magetan dan Kota Kediri , Madiun. Ketiga, Koridor Timur terdiri dari Kabupaten Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Lumajang, Jember, Banyuwangi dan Kota Probolinggo. Keempat, Koridor Utara terdiri dari Kabupaten Lamongan, Tuban, Bojonegoro, Ngawi, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep.

Diantara keempat tersebut yang memiliki pertumbuhan ekonomi paling tinggi adalah Koridor Utara Selatan. Pada Koridor Utara Selatan hampir semua sektor perekonomiannya mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, sehingga mampu menjadi tumpuan perekonomian. Maka dalam penelitian ini penulis memilih Kabupaten/Kota di Wilayah Koridor Utara Selatan Jawa Timur untuk dijadikan penelitian ini yaitu 6 Kabupaten (Gresik, Sidoarjo, Pasuruan, Mojokerto, Malang, Blitar) dan 6 Kota (Surabaya, Blitar, Pasuruan, Batu, Mojokerto, Malang) sebagai objek penelitian. Dikarenakan secara geografis letak kabupaten dan kota tersebut berada pada satu wilayah dan berdekatan tetapi berbeda tingkat Produk Regional Brutonya.

**Tabel 1.1: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Wilayah Koridor Utara Selatan Jawa Timur Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2014-2016 (Milliar Rupiah)**

No	Kabupaten/Kota	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1	Kabupaten Gresik	76.336,0	81.380,4	85.850,1
2	Kabupaten Sidoarjo	106.434,3	112.012,9	118.179,2
3	Kabupaten Pasuruan	80.105,4	84.415,7	89.011,2
4	Kabupaten Mojokerto	44.292,0	46.792,3	49.360,6
5	Kabupaten Malang	52.550,4	55.317,8	58.247,3
6	Kabupaten Blitar	19.920,2	20.928,5	21.991,4
7	Kota Surabaya	305.947,6	324.215,2	343.652,6
8	Kota Blitar	3.649,6	3.856,9	4.079,3
9	Kota Pasuruan	4.561,3	4.813,3	4.813,3
10	Kota Batu	8.572,1	9.145,9	9.750,9
11	Kota Mojokerto	3.774,6	3.991,4	4.221,8
12	Kota Malang	39.724,7	41.952,1	44.303,9

Sumber : BPS Jawa Timur (Diolah)

Berdasarkan uraian serta tabel di atas maka dalam penelitian ini akan dilaksanakan penelitian yang lebih lanjut mengenai “**Analisis Potensi Sektor Unggulan di Wilayah Koridor Utara Selatan Jawa Timur**”

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Apa saja kah Sektor Basis dan Sektor Non Basis yang ada di Wilayah Koridor Utara Selatan Jawa Timur?
2. Apakah terdapat sektor yang mendorong pertumbuhan sektor didaerah lain di Wilayah Koridor Utara Selatan Jawa Timur?
3. Bagaimanakah tingkat kemajuan daerah di Wilayah Koridor Utara Selatan Jawa Timur menggunakan tipologi klassen?



### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak di capai oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sektor basis dan non-basis di Wilayah Koridor Utara Selatan Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui bahwa di Wilayah Koridor Utara Selatan Jawa Timur terdapat sektor yang mendorong pertumbuhan sektor didaerah lain.
3. Untuk mengetahui tingkat kemajuan daerah di Wilayah Koridor Utara Selatan Jawa Timur.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Diharapkan dari penelitian ini dapat di peroleh manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat menambah perbendaharaan perpustakaan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN “Veteran” Jawa Timur.
2. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya agar dapat melengkapi apa yang kurang dalam penelitian ini dan mengembangkan kekurangan pada topik penelitian ini.
3. Untuk memberi wawasan dan informasi kepada pembaca tentang apa saja potensi yang ada di Kabupaten/ Kota tersebut dan sektor apa saja yang menjadi sektor unggulan maupun sektor tidak unggulan di Kabupaten/Kota tersebut.